

BAB V

KESIMPULAN

Pakualaman terbentuk dari adanya perjanjian Giyanti antara pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III dengan kelompok Pangeran Mangkubumi, yang terdiri dari Pangeran Mangkubumi, Pangeran Wijil, Pangeran Krapyak dan Pangeran Hadiwijoyo. Isi dari perjanjian tersebut adalah wilayah Mataram dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Yogyakarta sendiri dibagi menjadi dua wilayah yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Pakualaman berdiri terpisah dengan keraton Yogyakarta, walaupun begitu Pakualaman tetap menghormati keraton sebagai wilayah pemerintahan yang lebih dulu berdiri sebelum Pakualaman. Sistem pemerintahan di Pakualaman mirip sekali dengan yang ada di keraton, selain karena Pakualaman muncul dari sebagian wilayah Kasultanan, para penguasa yang ada di Pakualaman juga masih sedarah dengan para kerabat keraton.

Wilayah Pakualaman meliputi Kabupaten Brosot, yang ada di Kulon Progo, terdiri dari Galur, Tawangrejo, Tawangsoaka, Tawangkarto dan di tambah sebagian kecil wilayah Ibukota Yogyakarta, yang terletak di timur sungai Code yang dijadikan pusat pemerintahan Pakualaman. Wilayah Pakualaman yang berada di daerah Yogyakarta merupakan suatu wilayah dataran rendah, yang dari segala arah berbatasan langsung dengan daerah-daerah kekuasaan keraton Yogyakarta. Daerah perbukitan, dataran rendah, pantai dan rawa merupakan jenis topografi daerah Pakualaman yang ada di Adikarto. Penduduk Pakualaman sudah cukup padat dibuktikan dengan adanya pendataan penduduk pada tahun 1922,

penduduk Pakualaman sudah mencapai 5.000 lebih, baik yang di wilayah Yogyakarta maupun yang di Adikarto. Banyak penduduk Pakualaman kesehariannya bermata pencaharian sebagai petani. Namun seiring perkembangan perekonomian masyarakat Pakualaman, pekerjaan bertani mulai ditinggalkan, mereka beralih ke pekerjaan lain yang dinilai lebih menguntungkan masyarakat seperti pedagang, tukang kayu, pengrajin bambu, pengrajin batik, pengrajin tekstil dan sebagai tukang jagal hewan.

Pengenalan pendidikan di Pakualaman diawali dengan pendidikan dengan sistem tradisional. Biasanya pelajarannya tentang agama yang dapat di praktikan di kehidupan sehari-hari mereka. Dibangunnya beberapa sekolah yang didirikan pemerintah dengan sistem Barat, masyarakat mulai mengenal sistem Barat, terutama untuk keluarga Pakualaman. Tahun 1891 sudah banyak keluarga Pakualaman yang mulai masuk ke sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan sistem Barat. Mereka juga sempat melanjutkan sekolah mereka dari sekolah dasar sampai ke sekolah tinggi di luar negeri.

Setelah mereka lulus, mereka kembali ke Pakualaman dan mendirikan sekolah partikelir baik di wilayah Pakualaman yang ada di Yogyakarta dan di Adikarto. Sekolah yang terletak di wilayah Pakualaman yang di Yogyakarta bernama sekolah Surjengdjuritan Lor dan Padmosekarnan, sedangkan sekolah yang ada di Adikarto adalah sekolah Ongko Loro yang khusus disediakan untuk anak-anak dari pegawai Pakualaman yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi Lurah dan perangkat desa. Sekolah tersebut terlepas dari campur tangan pemerintah, jadi pihak Pakualaman berhak penuh atas segala urusan yang

bersangkutan dengan sekolah tersebut. Dalam perkembangannya, setelah Pemerintah mengetahui sekolah partikelir yang ada dapat berkembang dengan pesat, lalu pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur adanya sekolah partikelir yang mulai banyak bermunculan, salah satunya sekolah yang didirikan Pakualaman. Sejak saat itulah pemerintah mulai mencampuri dan mengawasi sekolah partikelir yang ada di Pakualaman.

Sekolah partikelir yang didirikan Pakualaman baik yang di wilayah Yogyakarta maupun yang di Adikarto, tentu saja sudah membawa banyak dampak dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Pakualaman. Adanya sekolah ini bisa menambah angka jumlah anak-anak pribumi sekitar Pakualaman yang telah mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan dengan sistem Barat. Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat Pakualaman dengan diperolehnya beberapa keahlian yang didapatkan dari sekolah partikelir tersebut, tentu saja membuka lebar peluang pekerjaan untuk masyarakat, baik itu dari pemerintah Pakualaman sendiri juga banyak dari pemerintah kolonial Belanda.

Lebih terbukanya kesempatan pekerjaan bagi masyarakat Pakualaman tersebut, tentu saja telah mengurangi jumlah pengangguran yang ada di wilayah Pakualaman. Pekerjaan di instansi pemerintah dianggap lebih menjamin kehidupan masyarakat, karena gaji atau upah yang di dapatkan lebih besar bila dibandingkan dengan penghasilan mereka sebelumnya yang hanya menjadi petani. Selain itu, pekerjaan ini juga dapat meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Dengan bekerja di instansi suatu lembaga tertentu, orang tersebut

dipandang masyarakat derajatnya akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan seseorang yang bekerja di bidang pertanian.

Selain adanya dampak dan pengaruh positif di kehidupan masyarakat Pakualaman, terdapat pula pengaruh negatif yang disebabkan dengan adanya pendidikan dengan sistem Barat tersebut. Seiring perkembangan pendidikan Barat yang diberikan di sekolah partikelir Pakualaman, terjadi pergeseran dari fungsi dan tujuan awal dibangunnya sekolah partikelir tersebut. Sekolah partikelir di Pakualaman dibangun untuk mengenalkan pada masyarakat Pakualaman tentang pendidikan dengan sistem Barat, selain itu sekolah partikelir dibangun juga untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Pakualaman. Tentu saja dengan pengenalan dan peningkatan pendidikan diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan di sekolah partikelir dengan menggunakan sistem Barat tujuannya hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan pekerjaan di instansi pemerintah dan lainnya. Bukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, dan membentuk kepribadian yang baik, sehingga tidak mau di jajah oleh Belanda. Masyarakat mulai meninggalkan kebudayaan Jawa yang selama ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat cenderung mulai terpengaruh dengan kebudayaan ke-Barat-baratan yang tentu saja tidak sesuai dengan budaya Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Terbitan Resmi

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2130. Berisi peraturan pengawasan sekolah partikelir tahun 1934

Arsip Puro Paku-Alaman No 2140. Berisi tentang pendirian sekolah tahun 1928

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2153. Berisi tentang penyediaan alat-alat yang digunakan di sekolah untuk proses belajar mengajar

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2304. Berisi tentang keadaan pendidikan di Paku-Alaman dan kawontenan abdi dalem

Arsip Puro Paku-Alaman No. 2323. Berisi tentang pengawasan sekolah, subsidi, pendirian, penyediaan buku, dan perbatasan jumlah buku

Buku

Abdurachman Surjomiharjo, *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta*, Yogyakarta : Yayasan untuk Indonesia. 2006

_____, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

Bambang Suwondo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: DEPDIKBUD, 1977.

Baudet, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1987

Breman, *Djawa: Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis*, Jakarta: Bhratara, 1971

Burger. D. H, *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Bhratara, 1977

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- _____, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- _____, *Sejarah daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Depdikbud, 1997.
- Djoko Dwiyanto, *Puro Pakualaman: Sejarah, Kontribusi dan Nilai Kejuangan*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.
- Djumhur. I, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV Ilmu, 1970.
- Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Ilmi Albadiyah, *Puro Pakualaman Selayang Pandang*, Yogyakarta: DEPDIKBUD, 1984.
- Johan Makmur, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, Jakarta: DEPDIKBUD, 1993.
- Kementrian Penerangan RI, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Kementrian Penerangan RI, 1953.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogya: Tiara Wacana, 1994.
- Mestoko, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Menyusun UU No. 02/1989*, Jakarta : INIS, 2004.
- Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- PEMDA DIY, *Kota Jogjakarta 200 tahun (7 Oktober 1956-7 Oktober 1956)*, Kota Praja Jogjakarta, 1956.
- Poerwokoesoemoe Soedarisman, *Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Gadjah Mada UP, 1985.
- Said, *Pendidikan Abad ke-20 dengan Latar Belakang Kebudayaan*, Jakarta: Mutiara, 1981.

- Sartono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- _____, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- _____, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (dari Emporium Sampai Imperium)*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- _____, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*, Jakarta: PT gramedia, 1990.
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Soeratman, *Perguruan Swasta*, Yogyakarta: Majelis Persatuan Taman Siswa, 1981.
- Soetedja Bradjanagara, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: t.p, 1982.
- Sri Sutjianingsih, *Sejarah Pendidikan DIY*, Yogya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
- Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Sutari Imam Banardib, *Sejarah Pendidikan*, Yogya: Andi Offset, 1955.
- Tauchid Mochammad, *Perguruan Partikelir*, Yogya: Majelis Luhur Persatuan Tamsis, 1955.
- Vitalis Djebras., *Mengapa Sekolah Partikelir?*, Ende: Arnolus, 1963
- Wasty Soemanto, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, Surabaya: USAHA NASIONAL, 1983
- Wuryanto Abdullah, *Geografi Budaya dalam Wilayah Pembangunan daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: DEPDIKBUD, 1976
- Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, Padang: Angkasa Raya, 1981

Majalah:

Karina Supeli, “Jepara: Sekolah Rakyat”, *Basis*: Balai Desa balong, 2008, hlm. 54

Kartono, Sastrodirjo, “Sekolah kebangsaan, Sekolah Rakyat Pancasila”, *Basis*, 2009, hlm.41.

Kristianto E, “Pendidikan di Daerah”, *Basis* 1984,hlm.33

Koentjaraningrat, Kumpulan karangan : Ikhtisar Sejarah Pendidikan di Indonesia dan Perubahan Orientasi Nilai Budaya Indonesia, 1982, hlm. 409

Mangan, J, “Pengaruh Sekolah pada masyarakat Tradisional di Indonesia”, *Prisma* 1986, hlm. 09.

Skripsi

Normi Sholikhah, “Perkembangan Sekolah katolik di Yogyakarta (1917-1940)”, *Skripsi*, Yogyakarta : UNY, 2005.

Parinem, “Perkembangan Pendidikan di Adikarto Tahun 1900-1942”, *Skripsi*, Yogyakarta : UNY, 2003.

Sedianto Setio, “Kerabat Pakualaman Dalam Pendidikan 1864-1930”, *Skripsi*, Yogyakarta : UGM, 1983.

Internet

Soeraji, *Kadipaten Pakualaman*, pada http : // www.google.com/Kadipaten Pakualaman. Diakses pada tanggal 19 Februari 2012

Suparman, Kaitan Kebudayaan dengan Pendidikan, pada http: //www.google.com/Kebudayaan dan Pendidikan. Diakses pada tanggal 20 Maret 2012